BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang sedang berkembang dengan pesat pada saat ini. Dengan kemajuan teknologi informasi, pengaksesan terhadap data atau informasi yang tersedia dapat berlangsung dengan cepat, efisien serta akurat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran sebuah model jaringan dengan akses baik lokal (intranet) maupun internet yang dapat menunjang kegiatan pertukaran informasi yang berlangsung di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), melalui pembangunan sebuah jaringan berbasis Linux menggunakan DMZ (Demilitary Zone) untuk komputer server LPSE. Jaringan di LPSE masih perlu diperbaharui terutama computer server agar pengamanan maupun pengaksesan data informasi *Apendo* (Aplikasi Pengaman Dokumen) dapat optimal. Bagian *Bidding dan Training Room* adalah salah satu bagian di dalam LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola *Apendo* (Aplikasi Pengaman Dokumen) di lingkungan LPSE. Yang dimaksud *Apendo* disini adalah aplikasi LPSE yang merupakan aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan salah satu unsur penting dalam *e-procurement* yaitu untuk menjamin keamanan dokumen penawaran rekanan dalam pertukaran dokumen. Tanggung jawab pengelolaan *Apendo* meliputi jaringan, distribusi, perawatan, perbaikan. Distribusi disini berarti proses penyedian perangkat keras (hardware) dan perangkat

lunak(software) ke ruangan *Bidding dan Training* karena LPSE merupakan pengadaan barang/ jasa secara elektronik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet.

Pada akhir Agustus 2007, Provinsi Jawa Barat dipilih oleh Bappenas menjadi salah satu satu dari 5 Pusat Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik berbasis internet (*e-government procurement*) Regional, di samping Provinsi Sumatera Barat,. Jawa Timur, Kalimatan Tengah dan Gorontalo.

Pada bulan Juli 2008, lelang pertama pengadaan tiga paket barang melalui fasilitas Pusat Layanan Pengadaan Elektronik Jawa Barat (LPSE Jabar) berhasil dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan ini memupus keraguan Pimpinan Provinsi Jawa Barat terhadap kehandalan sistem dan akseptabilitas kalangan penyedia barang dan jasa (*vendor*), yang kemudian menetapkan, minimal 75 persen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk APBD 2009 yang diperkirakan mencapai Rp 2,5 triliun atau sekitar 30 persen dari Anggaran Belanja Provinsi yang seluruhnya berjumlah Rp 8,3 triliun, akan dilakukan melalui sistem LPSE Jabar.

Sampai dengan 31 Maret 2009, tercatat 253 paket pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sudah dilaksanakan melalui sistem LPSE Jabar dengan nilai transaksi berjumlah Rp 0,44 triliun.

Dari data-data tersebut di atas, Provinsi Jawa Barat secara faktual telah memasuki era baru, yaitu era *e-government* atau layanan pemerintah secara elektronik yang memfasilitasi tata pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan, serta

lebih membuka kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam penentuan kebijakan dan proses pengambilan keputusan pemerintah.

Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, kendala proses komunikasi, jarak, waktu dan biaya dalam pengadaan barang dan jasa dapat direduksi secara signifikan. Tatap muka dan kontak secara fisik dalam proses pengadaan barang/ jasa antara panitia pengadaan dan penyedia (*vendor*), yang sering menjadi penyebab terjadinya intransparansi dan peluang bagi terjadinya korupsi, kolusi dan nespotisme (KKN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, juga tidak diperlukan lagi. Hal itu disebabkan karena sejak dari pendaftaran, penawaran, penyanggahan sampai dengan penentuan pemenang, dilakukan secara *online* dengan hanya membuka alamat situs web lembaga pemerintah yang dituju, maka sebuah konfigurasi jaringan sangatlah penting dan harus diterapkan secepat mungkin. Salah satunya adalah penerapan DMZ (Demilitary Zone). Dengan pengkonfigurasian DMZ pada jaringan linux akan membantu dalam pengamanan sistem internal dalam sebuah jaringan dan juga mengontrol semua akses jaringan dari luar jaringan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah, diantaranya :

1. Bagaimana membangun jaringan agar pengamanan dan pengaksesan data informasi dapat optimal.

2. Bagaimana menerapkan system DMZ (Demilitary Zone) pada suatu jaringan.
3. Bagaimana meningkatkan transparasi dan akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud dari kerja praktek ini adalah :

1. Membangun konfigurasi jaringan linux di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).
2. Menerapkan DMZ (Demilitary Zone) di system jaringan yang terdapat di LPSE.

1.3.2 Tujuan

1. Untuk mengoptimalkan system informasi jaringan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).
2. Agar mempermudah akses data informasi tanpa harus keluar akses internet, serta meningkatkan keamanan jaringan.
3. Agar meningkatkan transparasi dan akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah analisis ini meliputi :

Batasan permasalahan yang terdapat dari perancangan jaringan berbasis Linux di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) mencakup :

1. Pemasangan kabel jaringan pada super computer/computer server agar terkoneksi dengan computer lain.
2. Penginstallan system operasi linux pada super computer/computer server serta Mengkonfigurasi super computer/computer server LPSE.
3. Penginstallan software penunjang dibeberapa computer di LPSE antara lain software yang digunakan adalah VMWare, Putty.
4. Menkonfigurasi DMZ (Demilitary Zone).

1.5 Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data dapat diperoleh secara langsung dari objek penelitian dan referensi-referensi yang telah diperoleh. Cara-cara yang mendukung untuk mendapatkan data adalah sebagai berikut.

1.5.1 Survey/Observasi

Mengumpulkan data dengan cara pengamatan secara langsung terhadap system jaringan beserta semua kebutuhan yang diperlukan pada objek penelitian di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

1.5.2 Wawancara

Melakukan dialog secara langsung dengan pihak yang berwenang di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dalam memberikan keterangan terhadap data yang dibutuhkan.

1.5.3 Studi Literatur

Mencari data atau teori yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi baik melalui buku-buku ataupun dari internet.

1.6 Sistematika penulisan

Sistematika penyusunan laporan ini dibagi dalam beberapa bab dan sub bab dengan pembahasannya. Sistematika secara umum adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan dari kerja praktek.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan bab profil tempat kerja praktek yang didalamnya terdapat sub bab mengenai sejarah, logo, badan hukum serta struktur organisasi dan job description dari LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), dan landasan teori.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan jadwal kerja praktek dan cara kerja praktek.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan mengenai hasil penelitian selama kerja praktek serta saran yang diajukan untuk perbaikan lebih lanjut.